

**PERATURAN DESA BUKUR
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2023**



**DESA BUKUR
KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK**

Feb 11/2023

**PERATURAN DESA BUKUR
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2023**



**DESA BUKUR
KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK**

DOKUMEN

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
DESA BUKUR**

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-6
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-5
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-13
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-17
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-21
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-22
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-4
BAB V PENUTUP.....	V

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

PERATURAN DESA BUKUR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Bukur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bukur Tahun 2019 (Lembaran Desa Bukur Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKUR
dan
KEPALA DESA BUKUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bukur.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bukur dibantu Perangkat Desa Bukur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bukur
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bukur
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bukur

rencana pembangunan jangka menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Bukur untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun
2022

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa Tahun 2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan
Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bukur.

Ditetapkan di Bukur

pada tanggal 4 Oktober 2022



Diundangkan di Bukur

pada tanggal 5 Oktober 2022



LEMBARAN DESA BUKUR TAHUN 2022 NOMOR 4

PERATURAN DESA BUKUR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Bukur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bukur Tahun 2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Bukur ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bukur serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan juta Tiga Pulu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan	1.917.264.870	2.279.030.674	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	157.500.000	157.500.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset			
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	157.500.000	157.500.000	
4.2.	Transfer	1.759.764.870	2.121.530.674	
4.2.1.	Dana Desa	1.290.948.000	1.968.713.804	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	53.298.870	53.298.870	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	415.518.000	415.518.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	-	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		2.000.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4.3.6.	Bunga Bank	-	2.000.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.917.264.870	2.279.030.674	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Masyarakat Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Bukur sebesar Rp. 2.795.030.674 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Pulu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.620.000	33.972,960	
5.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	209.804.000	265.717.080	
5.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.991.800	30.790.000	
5.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	94.244.523	104.110.000	
5.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	23.700.000	
5.1.6	Penyediaan Operasional BPD	12.550.000	11.000.000	
5.1.7	Penyediaan Insentif RT/RW	43.200.000	45.200.000	
5.1.8	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	81.000.000	90.000.000	
5.1.9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		25.000.000	
5.1.10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000	5.000.000	
5.1.11	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.078.870	21.000.000	
5.1.12	Pelayanan administrasi umum kependudukan	3.252.200	3.000.000	
5.1.13	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	10.816.649	14.850.000	
5.1.14	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.992.189	1.700.000	
5.1.15	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.445.000	13.800.000	
5.1.16	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.100.000	5.500.000	

5.1.17	Penyusunan Perencanaan Desa	Dokumen	12.005.000	8.000.000
5.1.18	Penyusunan Keuangan Desa	Dokumen	1.400.000	1.500.000
5.1.19	Pengelolaan/Administrasi/Investarisasi/Penilaian Aset Desa		2.425.000	6.400.000
5.1.20	Pengembangan Sistem Informasi Desa		6.400.000	6.400.000
5.1.20	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa		18.500.000	30.000.000
5.1.21	Forum Pembina Desa		6.150.000	6.000.000
5.1.22	Sertifikasi Tanah Kas Desa			10.000.000
5.1.23	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		18.300.000	12.000.000
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
5.2.1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		94.500.000	104.600.000
5.2.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		6.000.000	31.500.000
5.2.3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa			4.000.000
5.2.4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			3.000.000
5.2.5	Penyelenggaraan Posyandu		128.200.000	186.800.000
5.2.6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		71.345.000	273.800.000
5.2.7	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		3.000.000	7.000.000
5.2.8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		2.000.000	7.000.000
5.2.9	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa			5.000.000
5.2.10	Pemeliharaan Jalan Desa			3.000.000
5.2.11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			428.200.000
5.2.12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani			121.110.334
5.2.13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa			45.310.300
5.2.14	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		27.216.000	87.632.000
5.2.15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN			30.000.000
5.2.16	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik			10.000.000

5.2.17	Pemeliharaan Permukiman	Samitasi		10.000.000
5.2.18	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa			55.000.000
5.2.19	Penyelenggaraan Informasi Publik (Poster, Baliho, Dll)			1.500.000
5.2.20	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/Instalasi Komunikasi dan informasi Lokal DeSA			3.000.000
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)		15.720.000	11.800.000
5.3.2	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			6.000.000
5.3.3	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		13.544.000	39.938.000
5.3.4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa		4.200.000	20.000.000
5.3.5	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		2.400.000	6.000.000
5.3.6	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		1.000.000	2.000.000
5.3.7	Kegiatan Kelembagaan Desa LKMD/LPM/LPMD Kartar, PKK		39.000.000	41.600.000
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana		10.380.000	175.000.000
5.4.2	Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia			10.000.000
5.4.2	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		259.314.570	
5.4.3	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal			55.000.000
5.4.4	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		1.275.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.1	Penanggulangan Bencana			10.000.000
5.5.2	Keadaan Darurat			5.000.000
5.5.3	Keadaan Mendesak.			200.000.000

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- Penerimaan Pembiayaan, meliputi:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Bukur

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan	31.294.931	1.000.000	
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	31.294.931		
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000	1.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	.		
6.2.2	Penyertaan Modal Desa		10.000.000	

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)

2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	52.620.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	265.717.080	209.804.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.790.000	18.991.800
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	104.110.000	94.244.523
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	23.700.000
06	Penyediaan Operasional BPD	11.000.000	12.550.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.200.000	43.200.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	120.000.000	81.000.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	20.000.000	
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.000.000	5.000.000
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih	25.000.000	27.078.870

Kode	Kegiatan	Ragu Ragu RKPDesa (Rp)	Ragu Ragu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1.000.000	3.252.200
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	14.850.000	10.816.649
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.700.000	3.992.189
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5.500.000	4.100.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	11.800.000	6.445.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	8.000.000	12.005.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.500.000	1.400.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.000.000	2.425.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Pyenyelenggaraan Pemerintahan Desa		
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.400.000	6.400.000
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	30.000.000	18.500.000
91	Forum Pembina Desa	6.000.000	6.150.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000	
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.000.000	18.300.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		

berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 24 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 22 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 91,7%

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.620.000	30.695.000	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	209.804.000	105.854.000	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.991.800	15.963.000	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	94.244.523	26.010.000	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	11.850.000	Belum Tercapai
7.	Penyediaan Operasional BPD	12.550.000	3.210.000	Belum Tercapai
8.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.200.000	14.400.000	Belum Tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	81.000.000	0	Belum Tercapai
10.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
11.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000	0	Belum Tercapai
12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
13.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
14.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	3.252.200	1.000.000	Belum Tercapai
15.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	10.816.649	0	Belum Tercapai
16.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa			
17.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
18.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.992.189	0	Belum Tercapai
19.	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan			
20.				
21.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
22.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	4.100.000	2.050.000	Belum Tercapai
23.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.445.000	3.955.000	Belum Tercapai
24.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	12.005.000	9.920.000	Belum Tercapai
25.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.400.000	400.000	Belum Tercapai
26.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.425.000	0	Belum Tercapai
27.	Penyusunan Kebijakan Desa			
28.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
29.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.400.000	3.795.000	Belum Tercapai
30.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD			
31.	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa			
32.	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	18.500.000	0	Belum Tercapai
33.	Forum Pembina Desa	6.150.000	2.050.000	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ belum tercapai
34.	Sub Bidang Pertanian			
35.	Sertifikasi Tanah Kas Desa			
36.	Administrasi Pertanian			
37.	Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin			
38.	Mediasi Konflik Pertanian			
39.	Penyuluhan Pertanian			
40.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.300.000	0	Belum Tercapai
41.	Pententuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)			
42.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa			

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 22 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	104.600.000	94.500.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	22.000.000	
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	1.000.000	6.000.000
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4.000.000	
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.000.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	5.000.000	
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	800.000	900.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	188.800.000	128.200.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	273.800.000	71.345.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.250.000	3.000.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.000.000	2.000.000
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	90.656.580	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani	108.690.460	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa	42.984.900	
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
	Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.592.800	27.216.000
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	10.000.000	
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	5.000.000	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	30.000.000	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	55.000.000	11.600.000
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyendaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.500.000	1.000.000
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.000.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 19 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 10 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 52,6 %.

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Pendidikan			
2.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	94.500.000	71.250.000	Belum Tercapai
3.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD			
4.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat			
5.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa			
6.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	6.000.000	6.000.000	Tercapai
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**			
9.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa			
10.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar			
11.	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan			
12.	Sub Bidang Kesehatan			
13.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan			Belum

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tidak Tercapai/ belum tercapai
14.	Penyelenggaraan Posyandu	128.200.000	91.795.000	Belum Tercapai
15.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan			
16.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.345.000	34.045.000	Belum Tercapai
17.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa			
18.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.000.000	2.800.000	Belum Tercapai
19.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional			
20.	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.000.000	2.000.000	Tercapai
21.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			
22.	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan			
23.				
24.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
25.	Pemeliharaan Jalan Desa			
26.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			
27.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
28.	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa			
29.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa			
30.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			
31.	Pemeliharaan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa			
32.	Pemeliharaan Embung Milik Desa			
33.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa			
34.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa			
35.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			
36.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani			
37.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Desa			
39.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			
40.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan			
41.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa			
42.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa			
43.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Embung Desa			
44.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa			
45.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.216.000	27.170.000	Tercapai
46.	Sub Bidang Kawasan Permukiman			
47.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN			
48.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa			
49.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa			
50.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga			
51.	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman			
52.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum			
53.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman			
54.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah			
55.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa			
56.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Sumur Resapan			
57.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa			
58.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga			
59.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Sanitasi Permukiman			
60.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Umum/MCK umum			
61.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman			
62.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pambuangan Air Limbah			
63.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**			
64.	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN			
65.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman			
66.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
67.	Pengelolaan Hutan Milik Desa			
68.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	11.600.000	5.750.000	Belum Tercapai
69.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
70.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
71.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			
72.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa			
73.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.000.000	0	Belum Tercapai
74.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			
75.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*			
76.	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
77.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa			
78.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa			
79.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
80.	Sub Bidang Pariwisata			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Desa			
82.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			
83.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa			
84.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata			

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 7 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	11.800.000	15.720.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.000.000	
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	85.942.600	13.544.000
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan		

		RKPDesa (Rp)	APBDesa (Rp)
	Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	1.000.000	4.200.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	12.000.000	2.400.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	2.000.000	1.000.000
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	5.000.000	4.760.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		
03	Pembinaan PKK	15.000.000	18.830.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat		
90	Pembinaan Karang Taruna		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.600.000	39.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 9 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 88,9 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan

dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai
 Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
2	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			
3	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	15.720.000	2.700.000	Belum Tercapai
4	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa			
5	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			
6	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	13.544.000	0	Belum Tercapai
7	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin			
8	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat			
9	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
10	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
11	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa			
12	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten			
13	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Keudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4.200.000	4.200.000	tercapai
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa			
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
17	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
18	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	1.000.000	0	Belum Tercapai
19	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa			
20	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	4.760.000	1.200.000	Belum Tercapai
21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa			
22	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa			
23	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga			
24	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
25	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
26	Pembinaan Lembaga Adat			
27	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			
28	Pembinaan PKK	18.830.000	15.160.000	Belum Tercapai
29	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			
30	Pembinaan Karang Taruna			
31	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.000.000	29.025.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 7 kegiatan

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

2)

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.000.000	10.380.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	50.000.000	259.314.570
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000	
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000	
03	Peningkatan Kapasitas BPD	3.500.000	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Kode	Kegiatan	Fagu RKPDesa (Rp)	APBDesa (Rp)
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1.000.000	1.275.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	55.000.000	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 42,8 %.

3) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
2.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa			
3.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			
4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa			
5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			
6.	Bantuan (Bibit/Pakan/dst) Perikanan			
7.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan			
8.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
9.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
10.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			
11.	Peningkatan Produksi Peternakan			
12.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa			
13.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.380.000	0	Belum Tercapai
14.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *			
15.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	259.314.570	118.413.200	Belum Tercapai
16.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
17.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			
18.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			
19.	Peningkatan Kapasitas BPD			
20.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
21.	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			
22.	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tidak Tercapai/ Belum tercapai
23.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)			
24.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
25.				
26.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
27.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM			
28.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi			
29.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian			
30.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
31.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
32.	Pembentukan BUM Desa			
33.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1.275.000	0	Belum Tercapai
34.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
35.				
36.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
37.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa			
38.	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa			
39.	Pengembangan Industri kecil level Desa			
40.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
41.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

dan Mendesak Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	15.000.000	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.000.000	554.500.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 33,3%.

- 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	.		
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat			
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	554.500.000	352.000.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan

1) Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rebug/musyawaharah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Bukur sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Pemerintahan Desa

1. Terjadi pergeseran anggaran karena suatu kegiatan yang mendesak sehingga menyebabkan pelayanan pemerintahan mengalami keterlambatan.
2. Sarana dan Prasarana kurang memadai sehingga pelayanan pemerintah Desa kurang optimal
3. Pendampingan dari Pemerintah Daerah yang kurang optimal tentang program yang masuk kedesa sehingga terjadi kebingungan di kalangan pemerintah Desa
4. Masih banyaknya perangkat yang kosong yang mengakibatkan rangkap Tupoksi yang mana membuat suatu pekerjaan kurang optimal.

B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa

1. Ada beberapa kegiatan Pembangunan Desa yang harus dihapus, karena perubahan skala prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022
2. SDM kurang mendukung untuk pengembangan Desa Wisata
3. Belum adanya bangunan Serba Guna yang di gunakan untuk segala acara dengan kapasitas besar
4. Penyelenggaraan Sub Bidang Kesehatan, kegiatan Posyandu Balita dan lansia dan Bina Keluarga Balita tidak dapat maksimal dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19.
5. Jalan Usaha Tani banyak yang memerlukan perbaikan (Pengerasan jalan) untuk mempermudah akses dalam mengangkut hasil pertanian
6. Belum Adanya mobil siaga Desa.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

beberapa lembaga Desa belum optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang di atur dalam peraturan dan perundang-undangan

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Kurangnya tenaga ahli di Desa untuk memfasilitasi kegiatan yang ada di bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Tidak tersedianya lahan untuk pembangunan kantor BUMDes
3. Merosotnya hasil pertanian karena serangan hama tikus, wereng.
4. Masih banyak terdapat saluran irigasi yang belum di plengseng sehingga aliran air sering mengalami penyumbatan
5. Masih kesulitan air untuk pengairan sawah dikala musim kemarau tiba, yang mengakibatkan ada kenaikan biaya tanam untuk pengairan.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak

1. Tenaga medis yang terbatas.
2. Perlengkapan yang tersedia masih belum lengkap dan belum memadai.
3. Tidak tersedia gedung/ruangan untuk Posko Tanggap Bencana, yang memadai sehingga ditempatkan pada Kantor Desa. Hal ini mengakibatkan aktivitas pelayanan masyarakat di Desa terganggu.

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Bukur yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 1) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)
 - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - 3) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - 6) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 7) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa
 - 8) Forum Pembina Desa
- e. Sub Bidang Pertanahan
- 1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 2) Sertifikasi Tanah Kas Desa

2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa

a. Pendidikan

- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
- 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa

b. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
- 2) Penyelenggaraan Posyandu
- 3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 4) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 5) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- 6) Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

e. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

- 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - 1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 2) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Kebudayaan dan Keagamaan
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 2) Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - 2) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa Kelembagaan Masyarakat
 - d. Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 1) Pembinaan PKK
 - 2) Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat
- a. Pertanian dan Peternakan
 - 1) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - 2) Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*
 - b. Dukungan Penanaman Modal
 - 1) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
5. Kegiatan prioritas bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat
- a. Keadaan Darurat
 - 1) Bantuan Langsung Tunai

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Pengelolaan keuangan Desa dengan aplikasi Siskeudes
4. Administrasi kependudukan dengan aplikasi Sedudo
5. Pengelolaan Aset Desa dengan aplikasi Sipades

7. Pemutakhiran data kemiskinan desa dengan aplikasi Siks NG
8. Pendataan Covid dengan aplikasi EDMC
9. Pendataan Konvergensi Stunting Dengan aplikasi EHDW
10. Pemutakhiran Profi Desa Dengan Aplikasi Prodeskel
11. Indek Desa Membangun dengan IDM
12. Evaluasi perkembangan Desa dengan aplikasi Epdeskel
13. Website Desa
14. Imput data Bumdes Dengan Aplikasi DDC
15. Data Desa Center

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023

BUKUR
PATIANROWO
NGANJUK
JAWA TIMUR

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan satuan	penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pe	
	Nama Program / Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Ke
		4	5		8		6	7	9	10	11	
Pelaksanaan Pemerintahan Desa												
Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1	1	Januari - Desember 2023	Desa	12 Bulan	Kepala Desa	33,972,960	ADD	v	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	1	1	Januari - Desember 2023	Desa	12 Bulan	Perangkat Desa	265,717,080	ADD	v	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	6	12	Januari - Desember 2023	Desa	12 Bulan	Kepala Desa	30,790,000	ADD	v	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1,2,3,18	1	1	1 Tahun	Kantor Desa	1 Paket	Masyarakat Desa Bukur	104,110,000	PAD,AD D,PBH	v	
	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	9	9	12 Bulan	Desa	9 orang	BPD	23,700,000	ADD	v	
	Penyediaan Operasional BPD	1,2,3,18	9	12	1 Tahun	Desa	12 kali	Anggota BPD	23,700,000	ADD	v	
	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	36	36	12 Bulan	Desa	36 Orang	RT dan RW	45,200,000	PAD,AD D	v	
	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	1	1	1 Tahun	Desa	1	Kepala Desa	90,000,000	PAD	v	
Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9.18	30	60	1 tahun	Desa	2	Kantor DESA	25,000,000	PAD,DD	v	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.18	1	1	1 tahun	Desa	1 Paket	Kantor DESA	5,000,000	ADD,PB H	v	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan satuan	penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola P	
	Nama Program / Kegiatan	Jumlah (Rp)								Sumber	Swakelola	Ke A D	
		Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.18	1	1	Nopember	Desa	1 Paket	Masyarakat Desa Bukur	21,000,000	PBH	v	
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1.18	1	1	Januari - Desember 2023	Desa	1 Paket	masyarakat Desa Bukur	3,000,000	ADD	v	
		Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1.18	1	1	1 tahun	Desa	1 Paket	Masyarakat Desa Bukur	14,850,000	DD	v	
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1	1	1 Tahun	Desa	1 Paket	Masyarakat Desa Bukur	1,700,000	DD	v	
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18	3	4	1 tahun	Desa	1 paket	Masyarakat Desa Bukur	11,800,000	DD	v	
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17,18	1	1	1 tahun	Desa	1 paket	Masyarakat Desa Bukur	5,500,000	DD	v	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18	1	1	1 tahun	Desa	1 paket	Masyarakat Desa Bukur	8,000,000	DD	v	
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18	2	2	1 tahun	Desa	1 paket	Masyarakat Desa Bukur	1,500,000	DD	v	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	12	12	Januari - Desember 2023	Desa	12 Bulan	Peningkatan Pelayanan Desa	6,400,000	DD	v	
		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pangkat Perangkat Desa	18	5	5	1 tahun	Desa	1 paket	Masyarakat Desa Bukur	30,000,000	PAD	v	
		Forum Pembina Desa	11,16,17,18	1	1	1 tahun	Desa	1 paket	Masyarakat Desa Bukur	6,000,000	ADD	v	
Pertanahan			Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	2	3	1 tahun	Desa	1 Paket	Pemerintah Desa	10,000,000	ADD	v

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan satuan	penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola P		
								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Ke	
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	11	11	1 tahun	Desa	1 Paket	BKAD	12,000,000	PBH	v		
Jumlah Bidang 1								744,967,080				
Pelaksanaan Pembangunan Desa												
Pendidikan	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	30	30	12 Bulan	Desa	12 Bulan	kesejahteraan Tenaga pendidik	104,600,000	DD	v	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,9,10	1	1	1 Tahun	Desa	1 paket	TK Darma wanita	31,500,000	DD	v	
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,9	1	1	1 Tahun	Desa	1 paket	Masyarakat Desa Bukur	4,000,000	DD	v	
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1,4	1	1	1 Tahun	Sekolah se Desa Bukur	1 paket	Peserta Didik Berprestasi	3,000,000	DD	v	
	Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	250	300	12 Bulan	Seruni, Dahlia, Kemuning	12 Bulan	Balita sampai 5 Tahun	186,800,000	DD	v
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,6,10,11,16	1	1	1 Tahun	Desa	1 paket	Satgas Covid	43,800,000	DD	v
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,6,10,11,16	5	10	1 Tahun	Desa	20	Ibu Muda	7,000,000	DD	v
		Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,6,10,11,16	1	1	1 tahun	Polindes Dusun Gebangsiwil	1 paket	Masyarakat Desa Bukur	7,000,000	DD	v
		Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3,6,10,11,16	1	1	1 Tahun	Desa	1 Unit	Masyarakat Desa Bukur	5,000,000	DD	v
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	1	1 Tahun	Desa	1 Paket	Desa Bukur	30,000,000	DD	v	

Kategori	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan satuan	penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola	
	Nama Program / Kegiatan	Jumlah (Rp)								Sumber	Swakelola	K	
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	31	31	12 bulan	Desa	31 Orang	Linmas Desa	11,800,000	PAD,ADD	v	
		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,15	31	31	1 Tahun	Desa	1 Paket	Linmas Desa	6,000,000	DD	v	
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	9,11,15	3	6	1 Tahun	Bukur Rt 10,8,6	2 UNIT	Bukur Rt 08 rt 09	52,850,000	DD	v	
2	Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,16,18	3	3	Agustus	Semek, Bukur, Gebangsiwil	3 Paket	Masyarakat Dusun Setempat	20,000,000	DD	v	
		Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	18	3	3	12 bulan	Desa	3 Orang	Havidz/Havidzoh	6,000,000	DD	v	
3	Kepemudaan dan Olah Raga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	4,16,18	1	1	1 Tahun	Desa	2 orang	Pemuda Wilayah Desa Bukur	2,000,000	DD	v	
4	Kelembagaan Masyarakat	Kegiatan Kelembagaan Desa LKMD/LPM/LPMD Kartar, PKK	4,5,18	1	1	12 Bulan	Desa	12 Bulan	Ketua LPM	41,600,000	ADD/DD	v	
Jumlah Bidang 3										140,250,000			
berdayaan Masyarakat Desa													
1	Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana	3,8,9,12,15	1	1	1 Tahun	Desa	100 M	Petani Desa Bukur	175,000,000	DD	v	
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia	4,5,17,18	1	1	1 Tahun	Desa	1 Paket	Anggota Lembaga Desa	10,000,000	DD	v	
3	Dukungan Penanaman Modal	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1,3,4,5,8,10	1	1	1 Tahun	BUMDESA	1 Paket	BUMDESA	55,000,000	DD	v	

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan satuan	penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pel	
	Nama Program / Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerj rn An De
Jumlah Bidang 4									240,000,000			
Pengulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak												
Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,15	1	1	1 Tahun	Desa	1 Paket	Masyarakat Desa Bukur	10,000,000	DD	v	
Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	1,2,3,4,5,9,15	1	1	1 Tahun	Desa	1 Paket	RTM	5,000,000	DD	v	
Keadaan Mendesak.	Keadaan Mendesak.	1,2,3,4,5,9,15	100	100	1 Tahun	Desa	1 Paket	RTM	200,000,000	DD	v	
Jumlah Bidang 5									205,000,000			
JUMLAH TOTAL									2.795.030.674			

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berebakal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercipta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

